

# Solmadapar Demo DPRD

## "Proses Hukum Temuan BPK!"

**PONTIANAK**—Kelompok massa yang tergabung dalam solidaritas Mahasiswa Pengemban Aspirasi Rakyat, Selasa (4/9), berunjuk rasa di DPRD Kalbar menuntut aparat penegak hukum

mengambil langkah atas temuan audit BPK terhadap pemerintah provinsi. Pansus DPRD Kalbar yang sudah dibentuk untuk memantau Pemprov dalam penyempurnaan temuan juga dianggap mandul. Karena itu dinilai lebih baik dibubarkan.

"Berdasar temuan audit BPK Perwakilan Kalbar untuk anggaran 2010

ditemukan beberapa kejang-galan pada aset dan munculnya anggaran siluman. Jumlah kebocoran mencapai Rp. 156 miliar. Sangat besar uang yang tidak jelas pengalokasiannya dan terindikasi di korupsi," kata juru bicara Solmadapar, Supito.

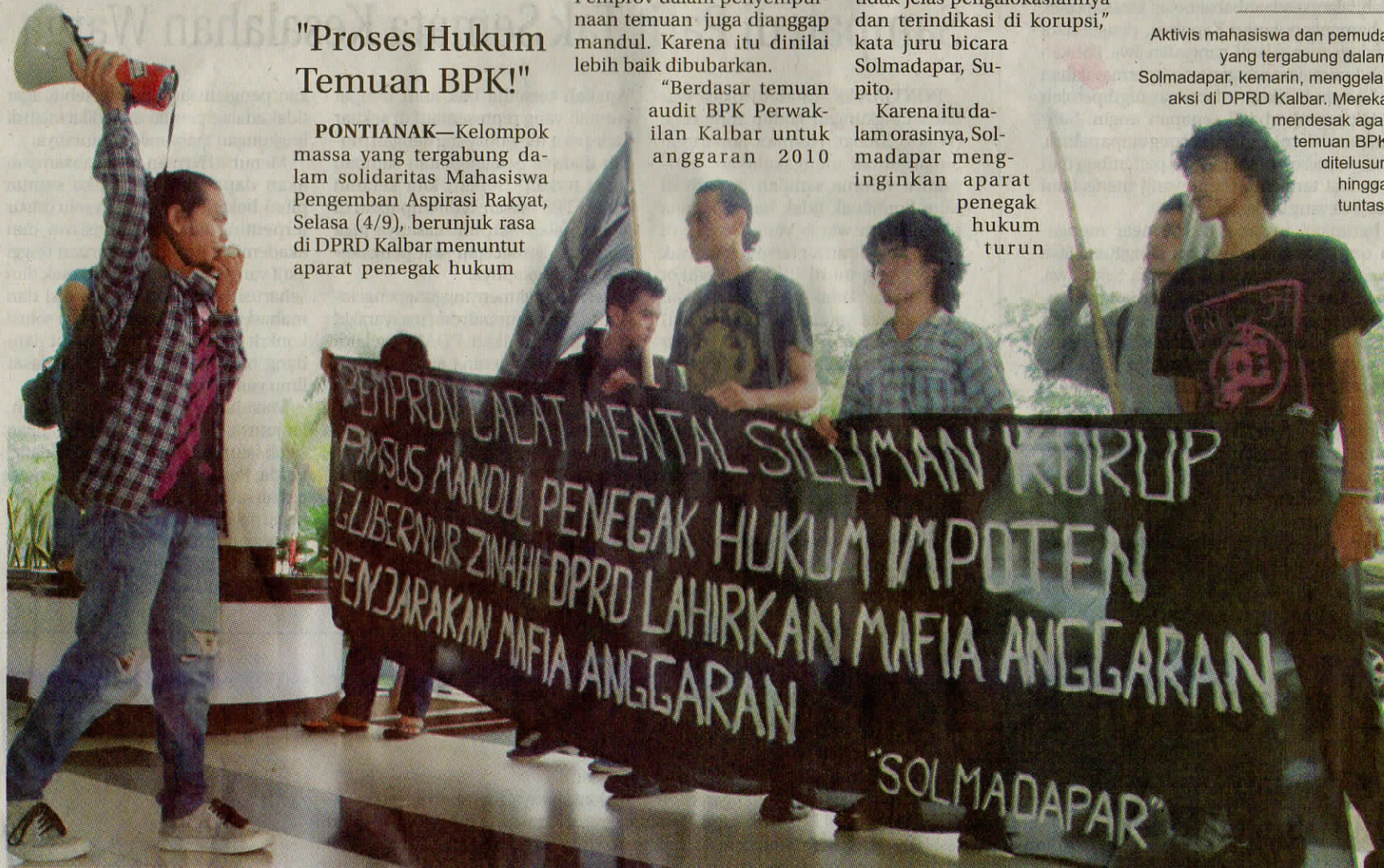
Karena itu dalam orasinya, Solmadapar menginginkan aparat penegak hukum turun

tangan menindaklanjuti hasil temuan audit BPK. Supaya

• ke halaman 15 kolom 5

### DEMO

Aktivis mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Solmadapar, kemarin, menggelar aksi di DPRD Kalbar. Mereka mendesak agar temuan BPK ditelusuri hingga tuntas.



## Solmadapar Demo DPRD

*Sambungan dari halaman 9*

alokasi keuangan negara kedepan tidak dipersalahgunakan. Melainkan sepenuhnya diperuntukkan bagi kepentingan rakyat.

Solmadapar juga menyayangkan sikap DPRD Kalbar yang terkesan lemah dan menganggap begitu lunak terhadap pemprov. Padahal temuan BPK merekomendasikan agar segera dilakukan perbaikan. Walau DPRD telah membentuk pansus untuk masalah tersebut, tapi kinerjanya tidak tampak. "Lebih baik Pansus dibubarkan. Pansus Mandul," kata Supito.

Peran Ketua DPRD ikut dipertanyakan. Dalam hal menyikapi temuan BPK di sejumlah SKPD Pemprov Kalbar. Desakan mundur juga ikut dilontarkan bila tidak mampu menyelesaikan permasalahan temuan audit BPK. Termasuk kepada seluruh anggota DPRD yang lagi menjabat.

"Tim Pansus DPRD Provinsi dan aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah. Jangan hanya makan gaji buta dan menunggu perintah. Pemprov juga harus segera menindaklanjuti hasil audit BPK secara objektif dan profesional. Kami tegaskan kepada Gubernur mengambil sikap

tegas bila jajarannya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan anggaran," kata Supito.

Demo Solmadapar di Gedung DPRD Kalbar mendapat pengawalan ketat aparat keamanan. Sejak bergerak dari bundaran Digulis Universitas Tanjungpura hingga tiba ke lokasi aksi. Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya sedang menggelar rapat bersama legislatif di gedung DPRD ketika Solmadapar berunjuk rasa. Kendati demikian tidak ada yang menerima unjuk rasa tersebut. Hingga pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. (*stm*)